

**PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN
TRANSPARANSI SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

**(Studi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lhoknga
Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Strata II**

Program Studi Magister Akuntansi



Disusun Oleh:

Cut Hadiatul Husna

Nim: 21402200032

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN
TRANSPARANSI SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

**(Studi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lhoknga
Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh)**

Disusun Oleh:
Cut Hadiatul Husna
Nim: 21402200032

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang
panitia ujian tesis Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Suktan Agung Semarang

Semarang, 30 Juni 2024

Pembimbing



Dr Sri Anik, SE., M.Si
Nik. 210493033

**PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN
TRANSPARANSI SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

**(Studi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lhoknga
Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh)**

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 20 Juli 2024

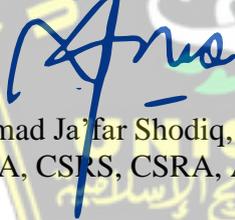
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing



Dr Sri Anik, SE., M.Si

Penguji I



Dr. H. Muhammad Ja'far Shodiq, SE., SSI,
M.Si, Ak, CA, CSRS, CSRA, ACPA

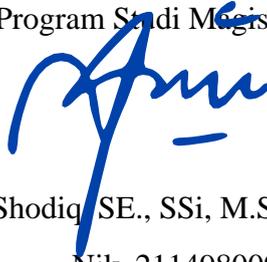
Penguji II



Prof. Dr. Hj. Indri Kartika, SE,
M.Si, Ak, CA

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Magister Akuntansi

Ketua Program Studi Magister Akuntansi



Dr. H. Muhammad Ja'far Shodiq, SE., SSI, M.Si, Ak, CA, CSRS, CSRA, ACPA
Nik. 211498009

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cut Hadiatul Husna

NIM 21402200032

Program Studi : Magister Akuntansi

Fakultas : Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini saya menyatakan tesis dengan judul:

“PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN TRANSPARANSI SEBAGAI VARIABEL MODERATING” (Studi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh).

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan plagiat skripsi orang lain. Semua isi dari skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Semarang, 10 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Cut Hadiatul Husna

Abstrak

Dana desa yang telah dikucurkan sejak 9 tahun yang lalu masih menyisakan desa dengan status sangat tertinggal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan transparansi sebagai variabel moderating.

Populasi pada penelitian ini adalah aparatur desa dikecamatan Lhoknga. Teknik sampling yang dipakai adalah *simple random sampling*. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang diperoleh berupa data primer. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji validitas, uji reabilitas, uji regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji F (simultan), koefisien determinasi (R square) dan uji statistik t (parsial).

Temuan dalam penelitian ini adalah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas baik secara langsung maupun jika dimoderasi oleh transparansi. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas bahkan ia memperkuat pengaruh variabel kompetensi, partisipasi serta secara bersama-sama antara variabel kompetensi, partisipasi dan pemanfaatan teknologi. Partisipasi terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel akuntabilitas jika tidak dimoderasi oleh transparansi. Sedangkan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas namun sebaliknya berpengaruh negatif jika dimoderasi oleh transparansi.

Kata Kunci – Kompetensi, Partisipasi, Teknologi Informasi, Akuntabilitas, Transparansi

Abstract

Purpose – The village funds that have been disbursed since 9 years ago still leave villages with a very disadvantaged status. The purpose of this study is to determine the influence of village government competence, community participation and the use of information technology on the accountability of village fund management with transparency as a moderating variable.

Design/methodology/approach –The population in this study is village apparatus in Lhoknga district. The sampling technique used is simple random sampling. This research is a quantitative research. The source of the data obtained is in the form of primary data. The data analysis techniques used in this study are descriptive analysis, validity test, reliability test, multiple linear regression test, classical assumption test, F test (simultaneous), coefficient of determination R and statistic t test (parsial).

Findings/ hypothesis – Competence has a significant effect on accountability both directly and if moderated by transparency. Transparency has a significant effect on accountability even strengthens the influence of competency variables, participation and jointly between competency variables, participation and technology utilization. Participation was shown to have no significant effect on the accountability variable if it was not moderated by transparency. Meanwhile, the use of technology has a positive effect on accountability, but it has a negative effect if moderated by transparency.

Keywords – Kompetensi, Partisipasi, Teknologi Informasi, Akuntabilitas, Transparansi

KATA PENGANTAR

Asaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan petunjuk, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam juga penulis hanturkan kepada nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat dihari akhir. Allaahummaa aamiin.

Selama rangkaian penyusunan usulan tesis ini penulis mendapat banyak dukungan, motivasi dan arahan. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Heru Sulistyono, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr Muhammad Ja'far Shodiq, SE., SSI, M.Si, Ak, CA, CSRS, CSRA, ACPA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr Sri Anik, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan sepenuh hati memberikan bimbingan, arahan serta masukan yang sangat membangun kepada penulis selama penyusunan usulan tesis ini sehingga mendapat hasil yang maksimal;

4. Segenap dosen Magister Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan inspirasi kepada penulis;
5. Suami, Orang tua dan saudara-saudara atas doa, bimbingan serta kasih sayang yang selalu tercurah kepada penulis;
6. Seluruh rekan seperjuangan Magister Akuntansi Angkatan II Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa menjadi teman diskusi, tempat berbagi keluh-kesah dan turut membantu selama menjalani proses perkuliahan.

Serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung memberi dukungan dan semangat. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan usulan penelitian tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu berbagai saran dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan dan dengan tujuan untuk kesempurnaan usulan penulisan tesis ini. Selanjutnya, semoga usulan penulisan tesis ini dapat bermanfaat khususnya dibidang akuntansi.

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh

Semarang, 10 Agustus 2024

Penulis,



Cut Hadiatul Husna

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN I	ii
HALAMAN PENGESAHAN II.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
(1) Manfaat Akademik.....	10
(2) Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Stakeholder Teori	11
2.2 Definisi Variabel Penelitian	12
(1) Akuntabilitas	12
(2) Kompetensi	13

(3) Partisipasi Masyarakat	13
(4) Pemanfaatan Teknologi Informasi	14
(5) Transparansi	14
2.3 Penelitian Terdahulu	16
2.4 Keterikatan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis	24
2.5 Kerangka Pemikiran	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Populasi dan Sampel	33
3.3 Sumber dan Jenis Data	35
3.4 Metode Pengumpulan Data	35
3.5 Definisi Operasional Variabel dan pengukuran Variabel	36
(1) Variabel Dependen (Variabel Terikat)	36
(2) Variabel Independen (Variabel Bebas)	36
(3) Variabel Moderating	38
3.6 Teknik Analisis Data	40
(1) Analisis Statistik Deskriptif	40
(2) Uji Kualitas Data	41
1) Uji Reliabilitas	41
2) Uji Validitas	41
(3) Uji Asumsi Klasik	42
1) Uji Normalitas	42
2) Uji Heteroskedastisitas	43
3) Uji Multikolinearitas	44
(4) Uji Moderated Regression Analisis	46
(5) Uji Kelayakan/ Goodness of Fit (Fit Model)	48
1) Uji Signifikansi Simultant (Uji F)	48
2) Uji Koefisien Determinasi (R Square)	49
(6) Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

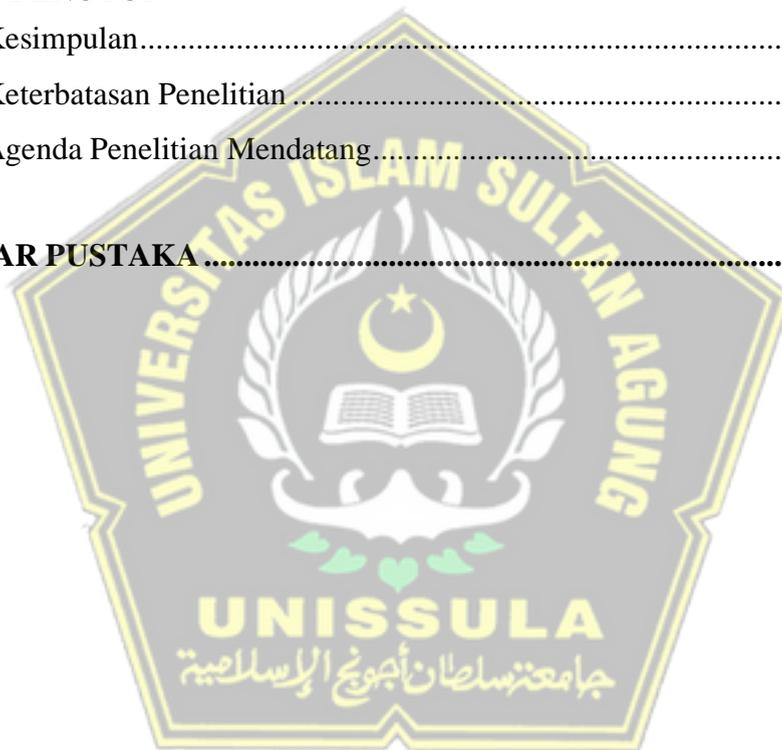
4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	51
(1) Deskripsi Responden	51
1) Identitas Responden Berdasarkan Jenis kelamin.....	52
2) Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	53
3) Identitas Responden Berdasarkan Tingkat pendidikan.....	54
4) Identitas Responden Berdasarkan Jabatan.....	55
5) Identitas Responden Berdasarkan Masa Kerja	56
(2) Deskripsi Variabel Penelitian	56
1) Deskripsi Variabel Kompetensi	57
2) Deskripsi Variabel Partisipasi.....	58
3) Deskripsi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	60
4) Deskripsi Variabel Transparansi.....	61
5) Deskripsi Variabel Akuntabilitas.....	62
4.2 Hasil Uji Kualitas Data.....	63
(1) Hasil Uji Reliabilitas	63
(2) Hasil Uji Validitas	64
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	65
(1) Hasil Uji Normalitas.....	66
(2) Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	66
(3) Hasil Uji Multikolinearitas	67
4.4 Hasil Uji Moderated Regression Analisis.....	68
4.5 Hasil Uji Kelayakan/ Goodness of Fit (Fit Model)	70
(1) Hasil Uji Signifikansi Simultant (Uji F).....	70
(2) Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)	71
4.6 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	72
4.7 Pembahasan	74
(1) Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas	74
(2) Pengaruh Partisipasi Terhadap Akuntabilitas.....	74
(3) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas.....	75

(4) Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas.....	75
(5) Pengaruh Kompetensi yang Dimoderasi Oleh Transparansi Terhadap Akuntabilitas	76
(6) Pengaruh Partisipasi yang Dimoderasi Oleh Transparansi Terhadap Akuntabilitas	77
(7) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Dimoderasi Oleh Transparansi Terhadap Akuntabilitas	77
(8) Pengaruh Kompetensi, Partisipasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Dimoderasi Oleh Transparansi Terhadap Akuntabilitas...	78

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Keterbatasan Penelitian	80
5.3 Agenda Penelitian Mendatang.....	80

DAFTAR PUSTAKA.....	81
----------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Aceh Tahun 2023.....	2
Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1 Jumlah Populasi	34
Tabel 3.2 Pengukuran Variabel.....	39
Tabel 4.1 Jumlah Penyebaran Kuesioner.....	52
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	53
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
Tabel 4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan.....	55
Tabel 4.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja	56
Tabel 4.7 Rentang Skala.....	57
Tabel 4.8 Deskripsi Responden Terhadap Variabel Kompetensi.....	57
Tabel 4.9 Deskripsi Responden Terhadap Variabel Partisipasi	59
Tabel 4.10 Deskripsi Responden Terhadap Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi	60
Tabel 4.11 Deskripsi Responden Terhadap Variabel Transparansi	61

Tabel 4.12 Deskripsi Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas	62
Tabel 4.13 Hasil Uji Realibilitas	64
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas.....	64
Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Monte Carlo Sig. (2-tailed Test).....	66
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinieritas	67
Tabel 4.17 Hasil Uji Heterokedastisitas	67
Tabel 4.18 Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik.....	68
Tabel 4.19 Hasil Uji MRA dengan persamaan Quasi Moderator	69
Tabel 4.20 Hasil Uji F.....	71
Tabel 4.21 Hasil Uji R Square	71
Tabel 4.22 Hasil Uji t.....	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	32
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	88
Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian.....	92
Lampiran 3 Statistik Deskriptif Karakteristik Responden	98
Lampiran 4 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	99
Lampiran 5 Hasil Uji Kualitas Data Penelitian.....	104
Lampiran 6 R Tabel	110
Lampiran 7 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	111
Lampiran 8 Hasil Uji MRA.....	113
Lampiran 9 Hasil Uji Kelayakan (Uji F dan R Square).....	114
Lampiran 10 Hasil Uji t.....	115
Lampiran 11 t Tabel.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dana desa telah dicanangkan semenjak tahun 2015 dimana pelaksanaannya pengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Program ini diluncurkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat lokal, terutama di daerah pedesaan, hal ini tertuang dalam PP (Peraturan Pemerintah) No.6 Tahun 2014 pasal 19. Sebagaimana juga yang tertuang dalam pasal 2 undang-undang desa, dana desa bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Wikantosa, 2022).

Alokasi dana desa pada setiap desa di Indonesia sangat bervariasi, dipengaruhi oleh jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, status IDM, kinerja desa dan lain-lain. Dana desa dengan jumlah puluhan triliun rupiah yang dikucurkan semenjak 2015 sudah sepatutnya membawa perubahan yang signifikan baik terhadap arah pembangunan desa tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

Namun demikian masih banyak ditemukan pengelolaan dana desa yang belum maksimal, hal ini terlihat dari status desa hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023. Berdasarkan data tersebut, masih ditemukan banyaknya desa dengan status sangat tertinggal yang bahkan telah sembilan tahun berkesempatan lebih besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri sesuai dengan kekuatan dan potensi desanya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa belum dilaksanakan secara efektif, efisien dan maksimal menggali potensi desa, sebagaimana tujuan utama dikucurkannya dana desa adalah menjadikan desa berdaya dan mandiri. Berikut data dua tahun terakhirnya:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM)
Provinsi Aceh Tahun 2023

Status Desa	2022		2023		Selisih	
	Jumlah Desa	Persentasi	Jumlah Desa	Persentasi	Jumlah Desa	Persentasi
Mandiri	5	0.59%	6	0.70%	1	0.11%
Maju	34	3.99%	75	8.80%	41	4.81%
Berkembang	396	46.48%	491	57.63%	95	11.15%
Tertinggal	398	46.71%	265	31.10%	133	15.61%
Sangat Tertinggal	19	2.23%	15	1.76%	4	0.47%

Sumber: Kementerian Desa, 2023

Berdasarkan pemutakhiran IDM tahun 2023, desa mandiri pada tahun 2022 di provinsi aceh adalah sebanyak 224 desa dari total 6.497 desa atau sejumlah 3.45%. Desa maju sebanyak 787 desa atau sejumlah 12.11%, desa berkembang 4027 atau sebesar 61.98%, desa tertinggal 1381 desa atau sejumlah 21.26% dan desa sangat tertinggal sebanyak 78 desa atau sejumlah 1.20%.

Sedangkan pada tahun 2023, desa mandiri di provinsi Aceh sejumlah 400 desa dari total 6.500 desa. Ini artinya ada penambahan tiga desa pada tahun ini dan peningkatan status desa mandirinya adalah sebanyak 176 desa atau sejumlah 2.7% dari tahun sebelumnya. Desa maju sebanyak 1260 desa atau sejumlah 19.38%, artinya terdapat peningkatan status desa maju sebanyak 473 desa atau sejumlah 7.27% dari tahun sebelumnya.

Desa berkembang pada tahun 2023 di provinsi Aceh adalah sebanyak 3984 desa atau sejumlah 61.29%, artinya terdapat penurunan jumlah status desa berkembang sejumlah 43 desa atau sebanyak 0.60% dari tahun sebelumnya. Desa tertinggal sebanyak 806 desa atau sejumlah 12.40%, artinya terdapat penurunan atau berhasil turun jumlah status desa tertinggal sejumlah 43 desa atau sebanyak 8.86% dari tahun sebelumnya. Desa sangat tertinggal sebanyak 50 desa atau sejumlah 0.77%, artinya terdapat penurunan jumlah status desa sangat tertinggal sejumlah 43 desa atau sebanyak 0.43% dari tahun sebelumnya.

Pemerintah melalui kementerian desa terus berupaya meningkatkan status desa-desa menjadi maju dan mandiri dengan menyusun program-program prioritas yang setiap tahunnya dikeluarkan dalam bentuk permendes. Namun sangat disayangkan, berdasarkan tabel diatas, masih ada 50 desa dengan status stagnan pada peringkat sangat tertinggal walau telah tujuh tahun dikucurkan dana desa untuk pembangunannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan pengelolaan dana desa yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Seperti yang tertuang dalam penetapan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan kesempatan

bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Hal ini sebenarnya sejalan dengan tujuan pengelolaan perusahaan secara umum adalah untuk keberlangsungan hidup perusahaan yang berdaya dan mandiri dimana menghasilkan laba sebesar-besarnya merupakan gambaran tingkat prestasi dan kinerja (Rahmah et al., 2018). Sehingga, untuk meningkatkan status desa, maka diperlukan akuntabilitas yang didukung oleh beberapa faktor, diantaranya kompetensi pengelola yang mumpuni (Indraswari & Rahayu, 2021); (Sarah et al., 2020); (Bawono et al., 2020);, tingkat partisipasi masyarakat desa (Masruhin & Kaukab, 2019) (Umaira & Adnan, 2019), pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa Luthfiani et al., (2020) serta transparansi (Nazaruddin et al., 2022); (Indriasih & Sulistyowati, 2022).

Menurut Savitri et al., (2022) keberhasilan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan tidak terlepas dari akuntabilitas pengelolaan dana desa. akuntabilitas merupakan isu penting bagi masyarakat dan organisasi (Ridwan et al., 2023). Garung & Ga, (2020) menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat memperbaiki kualitas serta kinerja instansi yang berorientasi pada kepentingan publik karena erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat luas. Sehingga tujuan pembangunan nasional bisa tercapai, yaitu percepatan pembangunan nasional melalui desa, daerah pinggiran dan perbatasan (Bawono et al., 2020).

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini dirumuskan dengan judul:

Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Dana Desa Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating. (Studi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh).

1.2 Rumusan Masalah

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa (Hoekstra et al., 2022). Selain itu pengelolaan keuangan desa yang akuntabel sangatlah membantu dalam mengambil keputusan ekonomi (Khamainy et al., 2022). Disisi lain E. P. Dewi, (2018) mengungkapkan bahwa salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan ekologi adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance* yang bisa dicapai dengan akuntabilitas. Selain itu, pembangunan desa harus memenuhi kepentingan masyarakat (E. P. Dewi, 2018).

Banyak hal yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pertama dan utama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi. Kompetensi adalah kekuatan utama dalam hal membangun kinerja yang efektif (Atmadja et al., 2018) dan (Azlina et al., 2017). Tingkat kompetensi pengelola merupakan komponen dasar dalam pelaksanaan pengelolaan organisasi sehingga mampu mewujudkan akuntabilitas pada kinerjanya yang baik.

Sesuai dengan temuan (Budiana et al., 2019); dan (Atmadja et al., 2017) yang menemukan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Indraswari & Rahayu, 2021); (Luthfiani et al., 2020) (Arif Widyatama et al., 2017) dimana kompetensi tidak mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Hal penting selanjutnya dalam mencapai akuntabilitas adalah partisipasi masyarakat dalam tiap tahap pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi anggaran (Šabović et al., 2021) dan (Gulo & Kakisina, 2023). Pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih baik jika melibatkan elemen masyarakat dalam pelaksanaannya (Shaleh et al., 2020).

Aktivitas publik merupakan salah satu pilar utama pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat (Bere et al., 2020). Partisipasi masyarakat memberikan peningkatan kinerja aparatur desa serta meningkatkan pengawasan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Namun, beberapa penelitian melaporkan temuan berbeda, yaitu partisipasi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan (April et al., 2018); (Indraswari & Rahayu, 2021) dan (Luthfiani et al., 2020).

Berikutnya untuk bisa mewujudkan akuntabilitas adalah teknologi informasi. Diera digitalisasi saat ini, pemanfaatan teknologi informasi berperan dalam mempercepat kinerja organisasi dalam mencapai akuntabilitas yang lebih baik. Hasil penelitian Perdana, (2018) di Kabupaten Bantul menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa. Begitupun dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia, (2018) di kabupaten Lima Puluh Kota serta hasil penelitian yang didapatkan oleh Nurhidayati, (2019).

Sebagai tambahan, penelitian yang dilakukan oleh Luthfiani et al., (2020) menyatakan bahwa aplikasi siskeudes (Sistem Keuangan Desa) berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian (Pahlawan et al., 2020) dan (Karyadi, 2019) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi tanggung jawab keuangan desa dan keandalan laporan lembaga keuangan pedesaan.

Dari uraian diatas maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Savitri et al., 2022); (Ridwan et al., 2023); (Aliamin et al., 2023) dan beberapa peneliti lainnya. Penelitian ini menambahkan variabel transparansi sebagai variabel moderating. Transparansi sangat penting untuk ditambahkan sebagai variabel moderasi dalam usaha meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui kompetensi, partisipasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

F. G. R. Dewi & Sapari, (2020) mengungkapkan bahwa transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) berpengaruh positif terhadap pembangunan desa namun akuntabilitas dan partisipasi tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. Ini artinya transparansi memainkan peran kunci dalam memoderasi. Anas & Setiyowati, (2021) mengungkapkan, transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa tanpa dimoderasi partisipasi

masyarakat dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa baik dengan sendirinya atau dengan dimoderasi oleh partisipasi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan kontroversi studi (*reserach gap*) yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- (1) Bagaimana hubungan kompetensi pengelola terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- (2) Bagaimana hubungan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- (3) Bagaimana hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- (4) Bagaimana hubungan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- (5) Bagaimana transparansi memoderasi hubungan kompetensi pengelola terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- (6) Bagaimana transparansi memoderasi hubungan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- (7) Bagaimana transparansi memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- (8) Bagaimana transparansi memoderasi hubungan kompetensi pengelola, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersamaan (*simultant*) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- (1) Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana hubungan kompetensi pengelola terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa;
- (2) Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana hubungan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa;
- (3) Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa;
- (4) Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana hubungan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- (5) Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana transparansi memoderasi hubungan kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa;
- (6) Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana transparansi memoderasi hubungan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan;
- (7) Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana transparansi memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa;
- (8) Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana transparansi memoderasi hubungan kompetensi pengelola, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan

teknologi informasi secara bersamaan (simultant) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.4. Manfaat Penelitian

(1) Manfaat Akademik/ Teoritis

Secara akademik penelitian ini diharapkan memberikan dalam memajukan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh kompetensi, partisipasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang di moderasi oleh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

(2) Manfaat Praktis

Hasil studi ini diharapkan bisa memberi manfaat praktis bagi kementerian desa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) serta dapat dipakai sebagai referensi atau bahan pertimbangan pengambilan keputusan, khususnya dalam pengembangan ilmu akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori ini menyatakan tentang perusahaan harus memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal and (Langrafe et al., 2020). Dalam hal ini, pemerintah desa dituntut juga untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat yang dapat saling mempengaruhi tindakan pemerintah desa.

Bahkan lebih dari itu, dalam teori ini sistem pemerintahan juga diharapkan mempertimbangkan kesejahteraan yang lebih luas seperti lingkungan dan sosial (Freeman et al., 2020) dan (Mu et al., 2023). Oleh sebab itu, teori ini cocok untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan hal manajerial, penciptaan nilai, etika serta menganalisis hubungan antara system pemerintahan, masyarakat dan individu yang dapat saling mempengaruhi.

Pemangku kepentingan dalam stakeholder theory meliputi owners, corporate managers itu sendiri, penduduk lokal, regional, nasional dan global, pelanggan, karyawan dan pemasok (Freeman, 2020). Pemerintah pusat merupakan salah satu pemangku kepentingan penting (Meutia & Febrianti, 2017). Sehingga bisa diambil kesimpulan, pemangku kepentingan di pemerintah desa meliputi pemerintah pusat, pemerintah desa itu sendiri, masyarakat desa serta lingkungannya.

Maka, pemerintah desa harus mempertimbangkan semua kelompok pemangku kepentingan saat membuat keputusan. Menurut Ifada et al., (2021) semakin besar pihak yang terlibat maka mereka dapat merekomendasikan berbagai kebijakan atau program sehingga mendukung keberlanjutan korporasi.

2.2 Definisi Variabel Penelitian

(1) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu jenis kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan tertentu melalui sarana pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala kepada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawabannya (Yesinia et al., 2018); (Mustofa 2012) dan (Mardiasmo, 2013).

Akuntabilitas yang baik ditunjukkan oleh adanya sistem akuntansi yang dapat memberikan informasi handal, akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan tepat waktu (Lestari et al., 2019). Akuntabilitas adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya atau dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada aparat desa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Noordiawan, 2006).

Akuntabilitas tidak hanya berasal dari pencapaian kinerja yang sukses tetapi juga melibatkan pengakuan kesalahan, belajar darinya, dan berjuang untuk perbaikan terus-menerus. Dengan demikian, akuntabilitas dapat diartikan sebagai

bentuk kewajiban pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

(2) Kompetensi

Ainswort et al., (2007) menyatakan bahwa kompetensi adalah kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Pengetahuan merupakan kompetensi yang cukup kompleks, karena skor pada tes pengetahuan sering gagal diprediksi oleh prestasi kerja, hal tersebut terjadi karena kegagalan mengukur pengetahuan dan keterampilan seseorang dengan cara yang sebenarnya dipergunakan dalam pekerjaan (Indraswari & Rahayu, 2021).

Menurut Rudana (2005), kompetensi dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja. Menurut Robbins (2007) kompetensi adalah kemampuan atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang ditentukan oleh kemampuan intelektual dan fisik. Maka, kompetensi meliputi kombinasi dari pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau fungsi di dalam setting pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

(3) Partisipasi

Partisipasi merupakan bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif, sadar dan sukarela dalam kegiatan dan keadaan tertentu yang terjadi dengan cara

yang berbeda antara individu dengan individu lain atau individu dengan sekelompok masyarakat (Sarifudin Mada et al., 2017).

Tumbuh dan berkembangnya partisipasi dalam proses pembangunan mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan (Bere et al., 2020). Hal ini berarti, pemerintah mengakui bahwa masyarakat bukanlah sekedar obyek atau penikmat hasil pembangunan, melainkan pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diterima dalam usaha pembangunan (Thomas, 2013).

(4) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah alat bersistem yang digunakan untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan manusia. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian utama yang digunakan untuk membantu pekerja dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi bentuk informasi yang mudah dipahami untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan guna memberikan pelayanan yang baik kepada publik (Aulia, 2018). Maka, teknologi informasi adalah sebuah aplikasi berbasis digital yang mudah diakses, dijangkau dan digunakan dari segala lokasi.

(5) Transparansi

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam (Mardiasmo, 2013) menyatakan bahwa keterbukaan adalah kebebasan dalam mendapatkan informasi. Transparansi dalam pengelolaan dana desa harus dipertontonkan agar tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Dwiyanto, 2015).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat langsung diperoleh secara transparan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (Hanny S. Untayana et al., 2023). Maka, transparansi adalah suatu keterbukaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai. Transparansi merupakan komponen yang sangat penting dan harus ada dalam pembuatan laporan keuangan desa atau pengelolaan dana desa. Semua bukti pendapatan dan belanja harus transparan dan bisa ditelusur.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul penelitian	Hasil Penelitian
(1)	(Aliamin et al., 2023)	Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, dan Peran Pendamping terhadap Efektifitas Dana Desa Kabupaten Simeulue	1) Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengelolaan dana desa. 2) Akuntabilitas juga berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengelolaan dana desa. 3) Uji pendamping desa berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengelolaan dana desa.
(2)	(Ridwan et al., 2023)	Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat Pada Hubungan Kompetensi Pengelola, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1) Kompetensi pengelola, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2) Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan sebagai variabel moderasi antara kompetensi pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, 3) Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan positif sebagai variabel moderasi antara pengendalian

			intern, pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
(3)	(Sofyani et al., 2023)	The Story of Rising Corruption Post-Village Government Reform – A View of Three Theories: Fraud, Managerial Hegemony, and Culture	1) Korupsi terjadi karena praktik tata kelola berupa; akuntabilitas, transparansi, dan kevalidan administrasi karena kewenangan berlebihan kepala desa dalam memegang mengelola uang desa dan kurangnya mekanisme partisipasi.
(4)	(Savitri et al., 2022)	Accountability of Village Fund Management in Riau Province	1) Kompetensi perangkat desa, 2) partisipasi masyarakat, dan 3) pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa
(5)	(Nazaruddin et al., 2022)	The Mediation Role of Internal Control Implementation	1) Pengendalian internal memediasi hubungan antara pengetahuan keuangan dan partisipasi masyarakat dalam kinerja akuntabilitas keuangan desa.
(6)	(Indriasih & Sulistyowati, 2022)	The Role of Commitment, Competence, Internal Control system, Transparency and Accessibility in Predicting the Accountability of Village Fund Management.	1) Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2) Kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
(7)	(N. M. A. M. Dewi et	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana	1) Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap

	al., 2022)	Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjarangkan. 2) Penggunaan teknologi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten Banjarangkan.
(8)	(Anas & Setiyowati, 2021)	Partisipasi Membentuk Hubungan Antara Aspek Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa	1) Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. 2) Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dimoderasi partisipasi masyarakat. 3) Trasparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa tidak dimoderasi partisipasi masyarakat.
(9)	(Indraswari & Rahayu, 2021)	Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1) Kompetensi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, 2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
(10)	(Riberu & Asyik, 2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan	1) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan kantor dinas, 2) Transparansi tidak berpengaruh
(11)	(Bawono et al., 2020)	Factors Affecting Accountability of Village	1) Peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa,

		Fund Management through Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES)	<p>dan penerapan keuangan desa sebagiannya berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p> <p>2) Peran dan kompetensi perangkat desa sebagiannya berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penerapan keuangan desa.</p>
(12)	(F. G. R. Dewi & Sapari, 2020)	Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa	<p>1) Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa</p> <p>2) Transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan kebijakan desa berpengaruh positif,</p>
(13)	(Sarah et al., 2020)	The Effect Of Aparatur Competency, Organizational Commitment, Utilization Of Information Technology, Community Participation and Internal Control System of The Accountability of Village Management In Kabupaten Indragiri Hulu	<p>1) Kompetensi aparatur,</p> <p>2) Pemanfaatan teknologi informasi, dan</p> <p>3) Partisipasi masyarakat, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>
(14)	(Garung & Ga, 2020)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa	1) Akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

		(Add) dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka	2) Akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa
(15)	(Pahlawan et al., 2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kompetensi perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2) Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3) Sistem pengendalian internal berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 4) Penggunaan teknologi informasi berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
(16)	(Luthfiani et al., 2020)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Lombok Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kompetensi perangkat desa dan patisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, 2) Aplikasi siskeudes berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.
(17)	(Umaira & Adnan, 2019)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas	1) Partisipasi masyarakat sebagian maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

		Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)	2) Kompetensi sumber daya manusia baik sebagian maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
(18)	(Budiana et al., 2019)	The Effect of Village Device Competencies and Internal Control System on Accountability of Village Management	1) Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai pengaruh sebesar 0,288.
(19)	(Karyadi, 2019)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Di Kecamatan Aikmel Dan Kecamatan Lenek Tahun 2018)	<p>1) Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa.</p> <p>2) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa.</p> <p>3) Secara simultan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa.</p>
(20)	(Masruhin & Kaukab, 2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap	<p>1) Kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.</p> <p>2) Nilai adjusted R square adalah 93,9%. Ini berarti pengelolaan</p>

		Pengelolaan Dana Desa	dana desa dapat diprediksi dari variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran. Sedangkan 6, 1% dipengaruhi oleh variabel lain.
(21)	(Nurhidayati, 2019)	Does Digital Public Service Complaint Promote Accountability? A Comparative Analysis of Upik Yogyakarta and Qlue Jakarta	1) Akuntabilitas dipengaruhi oleh demokratis, Jaminan, Kompetensi dan Kinerja. 2) Mekanisme penanganan pengaduan yang efektif meningkatkan akuntabilitas.
(22)	(Atiningsih & Ningtyas, 2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1) Kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
(23)	(Perdana, 2018)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul	1) Kompetensi pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2) Partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
(24)	(April et al., 2018)	Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran berkonsep	1) Secara parsial akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran.

		Value for Money	
(25)	(Atmadja et al., 2018)	The Influence Of Village Conflict, Village Apparatus Ability, Village Facilitator Competency and Commitment of Local Government on The Success of Budget Management	1) Konflik desa dan komitmen pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan anggaran desa, 2) Kemampuan aparatur desa dan kompetensi fasilitator desa berpengaruh signifikan.
(26)	(Aulia, 2018)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1) Kompetensi pengelola dana desa, pemanfaatan teknologi informasi dan Partisipasi masyarakat berdampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
(27)	(Atmadja et al., 2017)	Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa	1) Kompetensi aparatur dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa, 2) Moralitas terbukti sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi aparatur dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
(28)	(Sarifudin Mada et al., 2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap	1) Kompetensi pengelola dana desa, Partisipasi masyarakat dan Komitmen organisasi pemerintah desa berdampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana

		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	desa.
(29)	(Arif Widyatama et al., 2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa	1) Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2.4 Keterkaitan antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

(1) Pengaruh kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi merupakan kekuatan utama dalam hal membangun kinerja yang efektif dan menghasilkan output yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas (Perdana, 2018). Kompetensi menghasilkan pencapaian kinerja yang ditargetkan oleh kementerian desa (Arif Widyatama et al., 2017). Maka, terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa (Rasmi et al., 2018).

Kompetensi perangkat desa merupakan modal utama dalam pembangunan dan berjalannya pemerintahan desa yang mandiri sesuai dengan keunikan dan kearifan lokalnya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Aliamin et al., 2023) dan (Atiningsih & Ningtyas, 2019) kompetensi berpengaruh positif terhadap tanggung jawab pengelolaan sumber daya desa, hal ini dapat diartikan

bahwa semakin kompeten pemerintah desa maka semakin bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya desa.

Sedangkan dalam hubungannya dengan stakeholder theory, maka dibutuhkan kemampuan dalam memberikan kebermanfaatan terhadap semua stakeholder terkait. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nazaruddin et al., (2022) dan (Santoso et al., 2022) menunjukkan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dana desa karena aparatur desa yang memiliki pengetahuan dan pendidikan yang matang akan sangat membantu dalam melancarkan setiap kegiatan desa. Pengelolaan dana desa hendaknya ditangani oleh pejabat yang mempunyai kemampuan yang baik (Perdana, 2018). Pahlawan et al., (2020) juga menjelaskan bahwa kemampuan pengelola dana desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di kecamatan Harau. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

(2) Pengaruh partisipasi masyarakat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi adalah keterlibatan atas dasar kerelaan yang akan mewujudkan hasil sebagaimana yang diharapkan (Latunussa et al., 2022). Mekanisme partisipasi masyarakat dapat meningkatkan arus informasi antara masyarakat dan pemerintah sehingga mengarah pada efisiensi pengelolaan keuangan desa. Kedua

elemen stakeholder ini sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan desa kearah yang lebih baik.

Keterlibatan masyarakat bisa menjadi alat komunikasi dan dapat menciptakan loyalitas serta citra baik terhadap lembaga untuk membantu pencegahan pada potensi kebijakan-kebijakan yang menyimpang dan tidak sesuai (Sofyani et al., 2023). Semakin baik partisipasi masyarakat maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel (Pangayow & Patma, 2021). Ketika masyarakat desa terlibat aktif dalam setiap pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa, ini akan menciptakan akuntabilitas karena tindakan dan keputusan pemerintah desa dapat dilihat dan dinilai oleh masyarakat (Sarifudin Mada et al., 2017) dan (Pahlawan et al., 2020).

Peran partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan oleh aparaturn pemerintah desa sangatlah penting. Partisipasi masyarakat yang proporsional mampu memberikan dampak positif pada pembentukan whistleblowing system tingkat desa. Masyarakat dapat merespon keputusan dan tindakan pengurus agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kecurangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa. Sehingga akuntabilitas yang tercipta akan membawa pada tercapainya tujuan desa dengan baik (Hoekstra et al., 2022), (Sofyani et al., 2023) dan (Atiningsih & Ningtyas, 2019).

Berdasarkan temuan (Sarah et al., 2020) partisipasi masyarakat mendorong terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa. Hal tersebut akan berdampak pada pengawasan kinerja pengelola dan meminimalisir kesalahan

teknis sehingga capaian yang diharapkan dapat diwujudkan (Rahayu & Setiyawati, 2021). Semakin tinggi keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa maka semakin rendah kecenderungan potensial atas penipuan sehingga pengelolaan dana desa juga akan semakin akuntabel (Sofyani et al., 2023). Maka berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Partisipasi masyarakat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

(3) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kepala desa yang merupakan stakeholder primer harus mampu menerapkan prinsip tanggung jawab dalam mengelola keuangan desa yang dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan kemampuan teknologi informasi. Teknologi informasi yang memadai dan handal mampu membantu percepatan pelayanan dan meningkatkan kinerja pemerintah desa sehingga mendorong peningkatan kinerja, yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Sarah et al., 2020).

Pemanfaatan teknologi informasi akan berdampak positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya pengelolaan kas desa karena memiliki keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Savitri et al., (2022) menjelaskan penerapan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan kegiatan perangkat desa, termasuk kemampuan

mengolah data dan mengelola dokumen secara terintegrasi yang merupakan sebuah akuntabilitas.

Menurut (Sarah et al., 2020), pemanfaatan teknologi informasi akan mengurangi kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan data, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sehingga mampu mengarahkan kepada akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi mendorong tanggung jawab pengelolaan dana desa yang lebih baik oleh pejabat yang ditugaskan.

Penggunaan teknologi informasi juga mengurangi kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam pengelolaan informasi atau penginputan data. Berkat teknologi informasi, informasi yang diolah memudahkan pengelolaan perangkat dan akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Aulia, 2018) dan (Arif Widyatama et al., 2017). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

(4) Pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa disebut berkualitas apabila memenuhi aspek transparan dan akuntabel (Anas & Setiyowati, 2021). Kedua hal ini merupakan fokus utama dalam pelaksanaan system pemerintahan yang baik dan berkelanjutan bagi semu stakeholder terkait (Tambuwun et al., 2018). Hasil penelitian Fahrezi, (2022) dan Napisah & Taufiqurachman, (2020) menunjukkan ada pengaruh positif, signifikan dan simultan antara akuntabilitas dan transparansi laporan

keuangan. Maka, transparansi merupakan salah satu aspek yang dapat menumbuhkan citra penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Pemerintahan yang baik dapat dilihat dengan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat setempat. Pengelolaan dana yang transparan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dikarenakan masyarakat dapat melihat semua dana yang ada pada laporan keuangan digunakan untuk apa saja dan sudah jelas. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

(5) Pengaruh transparansi dalam memoderasi hubungan antara kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Transparansi berhubungan erat dengan akuntabilitas karena terkait dengan pertanggungjawaban yang bisa dijelaskan (Riberu & Asyik, 2021). Untuk membuat pertanggung jawaban yang jujur, diterima oleh stakeholder dan akurat maka dibutuhkanlah kompetensi. Sebagaimana yang dibuktikan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya: (Karyadi, 2019); (Masruhin & Kaukab, 2019); (Nurhidayati, 2019); (Atiningsih & Ningtyas, 2019); (Perdana, 2018); (Atmadja et al., 2018) dan (Aulia, 2018). Maka maka hipotesis yang diajukan adalah:

H5: Transparansi memoderasi hubungan antara kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

(6) Pengaruh transparansi dalam memoderasi hubungan antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Transparansi bermakna bahwa masyarakat resmi memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mempelajari proses penganggaran. Transparansi berhubungan erat dengan akuntabilitas dan partisipasi karena terkait dengan pertanggungjawaban bersama yang disertai kejujuran untuk kebutuhan kolektif, yaitu bebas dari kepentingan individu dan atau golongan (Latunussa et al., 2022). Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Pemendagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tanpa adanya akuntabilitas, partisipasi dan transparansi maka masyarakat sebagai salah satu stakeholder akan kurang percaya terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H6: Transparansi memoderasi hubungan antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

(7) Pengaruh transparansi dalam memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut Sujarweni (2015) dalam (Garung & Ga, 2020) transparansi adalah menjamin akses dan kebebasan bagi setiap orang (stakeholder) untuk

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, baik informasi terkait kebijakan, proses dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai. Diantara lima prinsip administrasi management yang direkomendasikan oleh United Nations Development Program (UNDP) dalam (Hasniati, 2016), dua diantaranya adalah transparansi dan akuntabilitas. Maka, transparansi berhubungan erat dengan akuntabilitas dan pemanfaatan teknologi informasi karena pada praktiknya data yang relevan bisa saja diinput dengan tanpa kehadiran variabel transparansi. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H7: Transparansi memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

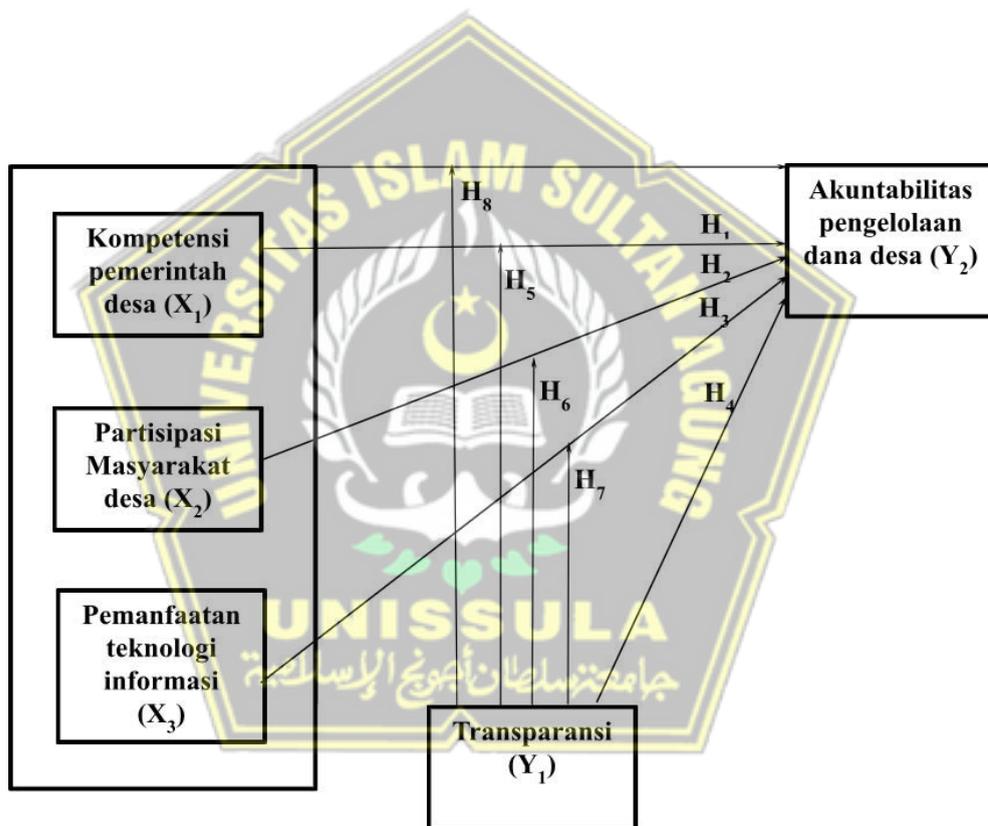
(8) Pengaruh transparansi dalam memoderasi hubungan antara kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut Hanafie et al., (2019) prinsip-prinsip good governance terdiri dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kompetensi. Begitupun halnya dengan pemanfaatan teknologi informasi (Sarah et al., 2020). Transparansi merupakan syarat yang pertama dan utama dalam mencapai akuntabilitas. Namun untuk meningkatkan efektivitas pengaruhnya terhadap ketiga indikator penelitian yang diajukan didalam penelitian ini, Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H8: Transparansi memoderasi hubungan antara kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.6. Kerangka Pemikiran Penelitian

Pada penelitian ini akan dilakukannya pengujian pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan transparansi sebagai variabel moderating (studi pada pengelolaan dana desa di kecamatan Lhoknga kabupaten Aceh Besar), maka kerangka pemikirannya sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penjabaran Kuantitatif (*Explanatory quantitative research*). Menurut Sugiyono (2019) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis peneliti. Widodo (2022), menyatakan bahwa penelitian yang bersifat *Explanatory* atau penjelasan adalah penelitian yang menyoroti pengaruh antar variabel-variabel penentu serta menguji hipotesis yang diajukan, dimana uraiannya mengandung deskripsi akan tetapi terfokus pada hubungan variabel.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2019), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik yang sama sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh aparat gampong di kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Jumlah aparat gampong di kecamatan ini adalah sebanyak 208 orang yang terdiri dari: 28 Keuchik/ kepala desa, 28 Sekdes/ sekretaris desa, 94 Kadus/ kepala dusun serta 58 Kaur Pembangunan/ kepala Urusan Pembangunan.

Kecamatan ini terdiri dari 4 kemukiman dengan 28 desa yang luas wilayahnya adalah 87.95 km² atau 8.795 Ha dimana jumlah penduduknya adalah sebanyak 17,931 orang (Usman, 2020).

Tabel 3.1
Jumlah aparat masing-masing gampong dalam kecamatan Lhoknga

No	Nama Gampong	Keuchik	Sekdes	Kepala Dusun	Kepala Urusan
1	Mon Ikeun	1	1	4	3
2	Naga Uambang	1	1	3	3
3	Lambaro Kueh	1	1	4	3
4	Lam Ateuk	1	1	3	3
5	Aneuk Paya	1	1	4	3
6	Lampaya	1	1	4	3
7	Lamkruet	1	1	4	3
8	Weuraya	1	1	3	3
9	Meunasah Lambaro	1	1	4	3
10	Mon Cut	1	1	3	1
11	Meunasah Manyang	1	1	3	1
12	Meunasah Karieng	1	1	3	3
13	Lamgaboh	1	1	3	3
14	Tanjong	1	1	3	3
15	Kueh	1	1	4	3
16	Nusa	1	1	4	3
17	Seibun Keutapang	1	1	3	1
18	Seibun Ayon	1	1	3	1
19	Lambaro Seibun	1	1	4	1
20	Meunasah Mesjid Lamlhom	1	1	3	1
21	Meunasah Baro	1	1	3	1
22	Meunasah Mesjid Lampuuk	1	1	3	1
23	Meunasah Balee	1	1	4	1
24	Lamgirek	1	1	3	1
25	Meunasah Beutong	1	1	3	3
26	Lamcok	1	1	3	1
27	Meunasah Blang	1	1	3	1
28	Meunasah Cut	1	1	3	1
Total peritem		28	28	94	58
Total Keseluruhan		208			

Sumber : Usman, 2020

Kecamatan ini dipilih sebagai tempat penelitian karena letaknya yang sangat dekat dengan kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh, tapi jumlah keluarga mandirinya hanya 29 keluarga dari total 4.485 keluarga. Sedangkan jumlah desa mandirinya adalah ... desa dari total 28 desa. Beberapa desa dikecamatan ini juga terletak dipesisir sehingga hasil penelitian ini akan lebih *comprehensive*.

Menurut Sugiyono (2019), sampel adalah bagian kecil dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama sehingga dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan sampel acak sederhana (*simple random sampling*). Pengambilan sampel pada metode ini dilakukan secara acak dimana seluruh anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data pada studi ini berupa data questioner yang diperoleh langsung dari obyeknya dan kemudian disebut sebagai data primer (Widodo, 2022).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2019).

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yaitu, variabel independen, dependen dan variabel moderating.

(1) Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Menurut Sugiyono, (2019) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa yang merupakan sistem pengelolaan pemerintahan yang dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan (Temalagi & Anakkota, 2020), (Pangayow & Patma, 2021) dan (Mus et al., 2023).

(2) Variabel Independen (Variabel Bebas)

Menurut Sugiyono, (2019) Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen yaitu kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat desa dan pemanfaatan teknologi informasi.

1) Kompetensi Pemerintah Desa

Kompetensi perangkat desa mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas yang dimiliki oleh perangkat desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat terkait lainnya untuk menjalankan tugas-tugas administrative dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa (Indraswari & Rahayu, 2021).

Mereka bertanggung jawab untuk mengelola dan mengkoordinasikan program-program pemerintah di tingkat desa, serta melayani kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat dengan tindakan nyata (Indraswari & Rahayu, 2021).

Beberapa kompetensi perangkat desa yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka meliputi pemahaman terhadap regulasi, manajemen keuangan, pelayanan dan tingkat partisipasi (Perdana, 2018).

2) Partisipasi Masyarakat Desa

Partisipasi masyarakat desa mengacu pada keterlibatan aktif dan kontribusi warga desa dalam berbagai aspek pembangunan desa, termasuk dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program pembangunan dan pemantauan program-program tersebut (Arifiyanto & Kurrohman, 2014).

Partisipasi masyarakat desa merupakan aspek penting dari demokrasi lokal dan pemerintahan yang inklusif di tingkat desa. Ini membantu masyarakat merasa memiliki kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah desa, serta memastikan bahwa kepentingan mereka diakomodasi (Latunussa et al., 2022).

Menurut Fatmawati et al., (2020) beberapa indikator partisipasi masyarakat desa yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat terlibat dalam kehidupan desa adalah: tingkat kehadiran, partisipasi dalam tahapan perencanaan dan pengawasan.

3) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi desa (TID) mengacu pada upaya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di tingkat desa untuk meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan proses administratif, dan memberikan manfaat kepada masyarakat desa (Sarah et al., 2020). Pemanfaatan TID bertujuan untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Ini dapat mencakup penggunaan komputer, internet, perangkat mobile, aplikasi, dan sistem informasi berbasis teknologi.

Beberapa indikator pemanfaatan teknologi informasi desa yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau efektivitasnya yakni: kesediaan infrastruktur, akses internet, pelayanan publik online (Aulia, 2018).

(3) Variabel Moderating

Menurut Sugiyono, (2019) variabel moderating adalah variabel yang memperkuat hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent. Variabel moderating dalam penelitian ini adalah transparansi.

Transparansi merujuk pada tingkat keterbukaan, kejelasan, dan keterbacaan informasi dalam suatu organisasi pemerintahan. Transparansi adalah prinsip penting dalam tata kelola yang baik dan memungkinkan akses informasi yang lebih baik bagi masyarakat serta pengawasan terhadap tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh sebuah entitas (Hanny S. Untayana et al., 2023). Ini menciptakan rasa kepercayaan, akuntabilitas, dan partisipasi dalam

pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak.

Berikut beberapa indikator transparansi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu entitas atau organisasi menjalankan prinsip transparansi: ketersediaan informasi publik, aksesibilitas informasi, pertanggung jawaban laporan keuangan (Savitri et al., 2022).

Tabel 3.2
Pengukuran Variabel

No	Variabel	Dimensi	Pengukuran (indikator)	Sumber
1	Akuntabilitas	Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya pengungkapan informasi yang (jelas) bisa ditelusuri. 2) Penyajian laporan keuangan tepat waktu. 3) Distribusi dana ke penerima yang tepat. 	(Temalagi & Anakkota, 2020), (Pangayow & Patma, 2021); (Mus et al., 2023); (Amy Springsteel et al., 2018)
2	Kompetensi	Pengetahuan Manajerial	<ol style="list-style-type: none"> 1) Administrasi 2) Regulasi 	(Indraswari & Rahayu, 2021); (Perdana, 2018)
		Sikap	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melayani 2) Empati 	
		Humaniora	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun kerjasama (Persuasive) 2) Menengahi konflik 	
3	Partisipasi	Kehadiran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Absensi rapat 2) Ikut urun saran dan voting 	(Fatmawati et al., 2020); (Sugista, 2017); (Knight et al., 2011); (Springsteel
		Keikutsertaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mensukseskan program yang disepakati 2) Mengakses Informasi 	
		Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apresiasi 	

			2) Kritik yang membangun	et al., 2018)
4	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pelaporan digital	1) Ketersediaan alat 2) Adopsi teknologi 3) Aksesibilitas digital 4) Integrasi teknologi	(Sarah et al., 2020), (Aulia, 2018)
5	Transparansi	Laporan keuangan	1) Ketersediaan informasi Laporan keuangan untuk publik 2) Aksesibilitas data dan informasi	(Hanny S. Untayana et al., 2023), (Savitri et al., 2022)
		Rapat Umum	1) Proses pengambilan keputusan yang terbuka 2) Ketersebaran undangan dan informasi rapat	

Skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Likert dengan skala 5 sebagai berikut:

- Skor 1 = STS (Sangat Tidak Setuju)
- Skor 2 = TS (Tidak Setuju)
- Skor 3 = N (Netral)
- Skor 4 = S (Setuju)
- Skor 5 = SS (Sangat Setuju)

3.6 Teknik Analisis Data

(1) Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis statistik yang memberikan gambaran secara umum mengenai persepsi jawaban dari masing-masing responden terhadap variabel penelitian. Statistik deskriptif penelitian ini dinyatakan dalam bentuk skala likert. Hasil tersebut kemudian dijelaskan menurut kriteria skala likert yang ada.

(2) **Uji Kualitas Data**

1) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Konsistensi jawaban ditunjukkan oleh tingginya koefisien alpha (cronbach). Semakin mendekati 1 koefisien dari variabel semakin tinggi konsistensi jawaban butir-butir pertanyaan semakin dapat dipercaya. Reliabilitas minimal 0.6 adalah reliabel (Ghozali, 2016). Untuk menghitung reliabilitas variabel dilakukan dengan bantuan program SPSS 10.0 for Windows.

2) Uji Validitas

Merupakan uji homogenitas item-item pertanyaan setiap variabel yang merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen penelitian. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang perlu diukur, tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud.

Menurut Ghozali, (2016) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat validitas yaitu *collected-item* dengan kriteria berikut ini:

- (a) Nilai r hitung $>$ r table disimpulkan tiap item kuesioner dinyatakan valid.

(b) Nilai r hitung $< r$ table disimpulkan tiap item kuesioner dinyatakan tidak valid.

(3) Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pengujian analisis asumsi klasik ini ditunjukkan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Model regresi yang memenuhi kriteria BLUE dapat digunakan sebagai estimator yang terpercaya dimana estimator dinyatakan tidak bebas, konsisten, terdistribusi normal dan juga efisien. Untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan memenuhi kriteria BLUE maka perlu dilakukan serangkaian pengujian yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual (selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi) terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak dilarang tetapi model

regresi linier berganda memerlukan normalitas pada nilai residualnya bukan pada masing-masing variabel penelitian Ghozali, (2016).

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa terdapat lima metode yang digunakan untuk menguji normalitas data, yaitu metode histogram, kurva normal (normal probability plot), skewness dan kurtosis, uji chi-square, dan uji kolmogorov-smirnov. Namun, dari kelima metode tersebut, Sugiyono merekomendasikan menggunakan uji kolmogorov-smirnov sebagai metode terbaik untuk menguji normalitas karena memiliki kelebihan yang dianggap lebih signifikan dibandingkan dengan metode lainnya.

Suatu instrumen dikatakan normal apabila tingkat signifikasinya lebih besar dari 0.05. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menguji normalitas residual dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Jika probabilitas signifikansi nilai residual lebih besar dari 0.05 maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Demikian pula sebaliknya, jika probabilitas signifikansi residual lebih rendah dari 0.05 maka data tersebut dikatakan tidak berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Bila nilai VIF mendekati 10 maka diduga data yang dipakai mengandung penyakit multikolinearitas (Ghozali, 2016).

Uji multikolinearitas adalah suatu hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau semua variabel independen. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen Ghozali, (2016). Mengukur multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance atau VIF dari masing-masing variabel.

(a) Ho: tidak terjadi multikolinearitas antar variabel-variabel bebas.

(b) Ha: terjadi multikolinearitas antar variabel-variabel bebas dengan

kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut:

- Jika nilai tolerance < 0.10 atau VIF > 10 maka terdapat multikolinearitas.
- Jika nilai tolerance > 0.10 atau VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas adalah cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat *Standardized Predicted Value* (ZPRED) atau nilai prediksi yang terstandarisasi dengan residualnya *Studentized Residual* (SRESID) atau residual siswa. Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah residual dan sumbu X adalah X yang telah diprediksi. Menurut Ghozali (2016) model regresi tidak terjadi heterokedastisitas jika grafik

scatterplot titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Hal yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data cross section mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran; kecil, sedang dan besar (Ghozali, 2016).

Untuk mengatasi masalah autokorelasi maka data penelitian akan diuji dengan run tes dalam spss. Uji autokorelasi sangat diperlukan karena dengan adanya uji ini kita dapat mengetahui apakah terdapat hubungan antara satu periode t dengan periode t sebelumnya. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah autokorelasi. (tapi uji ini bukannya untuk: merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linier untuk data time series yaitu data runtut waktu dan bukan untuk data primer (Raharjo, 2017). Kedua, koefisien determinasi juga cerita tentang time series.

Salah satu uji statistik lain yang lazim digunakan adalah uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya (Gujarati, 2004).

Heteroskedastisitas merupakan keadaan disaat terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Residual adalah

selisih antara nilai variabel Y dengan nilai variabel Y yang diprediksi, dan absolut adalah nilai mutlaknya (nilai positif semua). Heteroskedastisitas diuji dengan metode uji glejser. Pengujian dilakukan dengan meregresikan variable-variabel bebas terhadap nilai absolute residual. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual > 0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Mardiatmoko, 2020).

(4) Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated regression analysis (MRA) atau disebut uji interaksi digunakan untuk menguji variabel moderating yang menggunakan aplikasi khusus regresi linier berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Penelitian ini menggunakan persamaan moderasi quasi atau moderator semu:

Moderator semu (*quasi moderator*) merupakan variabel yang menghubungkan antara variabel prediktor dan variabel terikat, yang mana variabel moderasi semu berinteraksi dengan variabel prediktor sekaligus menjadi variabel prediktor. Maka persamaannya dapat ditulis dengan rumus berikut:

$$Y_2 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Y_1 + b_5X_1Y_1 + b_6X_2Y_1 + b_7X_3Y_1 + b_8X_1X_2X_3Y_1 + e$$

Keterangan:

- a : Konstanta
- b₁, b₂, b₃ : Koefisien arah regresi
- b₄, b₅, b₆, b₇, b₈
- Y₂ : Akuntabilitas pengelolaan dana desa
- X₁ : Kompetensi pemerintah desa

- X_2 : Partisipasi masyarakat desa
 X_3 : Pemanfaatan teknologi informasi
 Y_1 : Transparansi
 X_1Y_1 : Interaksi antara variabel X_1 (kompetensi pemerintah desa) dengan variabel Y_1 (transparansi)
 X_2Y_1 : Interaksi antara variabel X_2 (partisipasi masyarakat desa) dengan variabel Y_1 (transparansi)
 X_3Y_1 : Interaksi antara variabel X_3 (pemanfaatan teknologi informasi) dengan variabel Y_1 (transparansi)
 $X_1X_2X_3Y_1$: Interaksi antara variabel X_1 (kompetensi pemerintah desa), X_2 (partisipasi masyarakat desa) dan X_3 (pemanfaatan teknologi informasi) dengan variabel Y_1 (transparansi)
e: : Error

Pengambilan keputusan:

- (a) Jika interaksi X_1Y_1 adalah $\text{sig} < 5\%$ berarti transparansi terbukti sebagai variabel moderasi antara variabel kompetensi pemerintah desa (X_1) dengan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y_2).
- (b) Jika interaksi X_2Y_1 adalah $\text{sig} < 5\%$ berarti transparansi terbukti sebagai variabel moderasi antara variabel partisipasi masyarakat desa (X_2) dengan dengan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y_2).
- (c) Jika interaksi X_3Y_1 adalah $\text{sig} < 5\%$ berarti transparansi terbukti sebagai variabel moderasi antara variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_3) dengan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y_2).
- (d) Jika interaksi $X_1X_2X_3Y_1$ adalah $\text{sig} < 5\%$ berarti transparansi terbukti sebagai variabel moderasi secara bersamaan antara

variabel kompetensi pemerintah desa (X_1), variabel partisipasi masyarakat desa (X_2) dan variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_3) dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y_2).

(5) Uji Kelayakan Model/ Goodness of Fit (Fit Model)

Uji kelayakan model atau goodness of fit merupakan uji yang digunakan untuk menentukan tingkat kesalahan yang bisa diterima dan apakah keputusan menerima atau menolak hipotesis nol tergantung dari besarnya statistik.

1) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel independent terhadap variabel dependent. Uji dikenal dengan uji cocok kelayakan model regresi atau uji signifikansi model regresi. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan melihat nilai probabilitas dan nilai signifikansi α (5% atau 0.05). Cara pengambilan kesimpulan:

- (a) $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai probability $< 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara bersama-sama variabel independent mempengaruhi variabel dependent.
- (b) $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai probability $> 5\%$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya secara bersama-sama variabel independent tidak mempengaruhi variabel dependent.

2) Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan kapabilitas variabel dependen, berdasarkan nilainya. Koefisien determinasi dapat bernilai antara nol dan satu. Kemampuan variabel bebas (independent) terkendala jika R^2 rendah. Informasi fluktuasi variabel dependen pada dasarnya identik dengan ramalan jika nilai R^2 mendekati satu (Ghozali, 2019). Ketika R^2 sangat dekat dengan 1, dikatakan bahwa penelitian ini membaik.

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crosssection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

(6) Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui besaran satu variabel independent saat menerangkan dependen (Ghozali, 2019). Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen

secara signifikan. Pada dasarnya, uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual dalam hal menjelaskan variabel dependen yang akan diuji pada tingkat signifikan dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- (a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig < 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.
- (b) Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $sig > 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara online, yaitu menggunakan google form dan dibagikan secara offline kepada responden dimulai sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 30 April 2024. Data yang terkumpul adalah sebanyak 126 responden. Berikut data penelitian yang diperoleh peneliti:

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

(1) Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah aparatur desa dikecamatan Lhoknga, Aceh Besar sejumlah 150 responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara online, yaitu menggunakan google form dan dibagikan secara offline kepada responden dimulai sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 30 April 2024. Data yang terkumpul adalah sebanyak 126 responden. Berikut ini ringkasan jumlah penyebaran kuesioner yang dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebarakan kepada responden.	150
2	Kuesioner yang tidak dikembalikan kepada peneliti.	20
3	Kuesioner yang dinyatakan tidak dapat diolah, dikarenakan kekurangan pengisian informasi	4
4	Kuesioner yang layak untuk diolah.	126

Respon rate = $126:150*100\% = 84\%$

Sumber: Data primer yang diolah (2024)

Jumlah kuesioner yang disebarakan kepada responden adalah 150 eksemplar. Sedangkan total kuesioner kembali adalah sebanyak 130 eksemplar, namun terdapat empat kuesioner yang tidak diisi secara lengkap, sehingga tingkat *respon rate* kuesioner adalah sebesar 84%.

1) Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	115	91.3
Perempuan	11	8.7
Total	126	100

Sumber: Output data SPSS

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 126 responden, jumlah responden berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 115 responden atau sebesar

91.3% sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 11 responden atau sebesar 8.7%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa dominan aparatur (pemimpin) di Aceh Besar adalah laki-laki. Hal ini sudah sesuai dengan syariat islam yang berlaku di Aceh.

2) Identitas Responden Berdasarkan Usia

Identitas responden berdasarkan usia pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Jumlah	Persentase (%)
30 - 39 Tahun	57	45.2
40- 59 Tahun	63	50
> 60 Tahun	6	4.8
Total	126	100

Sumber: Output data SPSS

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berusia 30-39 tahun adalah sebanyak 57 responden atau sebesar 45.2%. Responden yang berusia 40-59 tahun adalah sebanyak 63 responden atau sebesar 50%. Responden yang berusia > 60 tahun adalah sebanyak 6 responden atau sebesar 4.8%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 30-40 tahun dengan persentase 45.2%. Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa (pemimpin) di Aceh Besar adalah para pemimpin

muda. Jika kita merujuk pada usia matang rasulullah diangkat Allah menjadi pemimpin adalah rentang usia 40 hingga 63 tahun.

3) Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SMA	82	65.1
Diploma 3	9	7.1
Strata 1 atau Diploma 4	35	28.8
Total	126	100

Sumber: Output data SPSS

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berpendidikan SMA adalah sebanyak 82 responden atau sebesar 65.1%. Responden yang berpendidikan diploma 3 adalah sebanyak 9 responden atau sebesar 7.1%. Responden yang berpendidikan strata 1 atau diploma 4 adalah sebanyak 35 responden atau sebesar 28.8%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berpendidikan SMA dengan persentase 65.1%.

4) Identitas Responden Berdasarkan Jabatan

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Persentase (%)
Keuchik	18	14.3
Sekretaris Desa	31	24.6
Kepala Dusun	30	23.8
Kepala Urusan	47	37.3
Total	126	100

Sumber: Output data SPSS

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menjabat sebagai keuchik atau kepala desa adalah sebanyak 18 responden atau sebesar 14.3%. Responden yang menjabat sebagai sekretaris desa adalah sebanyak 31 responden atau sebesar 24.6%. Responden yang menjabat sebagai kepala dusun adalah sebanyak 30 responden atau sebesar 23.8%. Responden yang menjabat sebagai kepala urusan adalah sebanyak 47 responden atau sebesar 37.3%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah yang menjabat sebagai kepala urusan dengan persentase 37.3%.

5) Identitas Responden Berdasarkan Masa Kerja

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah	Persentase (%)
Lebih dari 6 tahun	13	10.3
Kurang dari 6 tahun	113	89.7
Total	126	100

Sumber: Output data SPSS

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa jumlah responden dengan masa kerja lebih dari 6 tahun adalah sebanyak 13 responden atau sebesar 10.3%. Responden dengan masa kerja kurang dari 6 tahun adalah sebanyak 113 responden atau sebesar 89.7%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki masa kerja kurang dari enam tahun dengan persentase 89.7%.

(2) Deskripsi Variabel Penelitian

Kriteria penilaian akuntabilitas sebagai variabel dependen dan kompetensi, partisipasi, pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi sebagai variabel independen menggunakan rentang sebesar 1. Perhitungan rentang skala dari jawaban responden yang diperoleh dengan rumus:

$$Skala = \frac{Skor Maks - Skor Min}{Jumlah Kategori} = \frac{5 - 1}{4} = 1$$

Dari hasil perhitungan rentang skala diatas maka didapat rentang skala dengan numerik sebagai berikut:

Tabel 4.7
Rentang Skala

Rentang		Keterangan
0	1	Sangat Rendah
1.1	2	Rendah
2.1	3	Sedang
3.1	4	Tinggi
4.1	5	Sangat Tinggi

Adapun kecenderungan jawaban responden dari setiap butir pertanyaan kuesioner yang menunjukkan ukuran statistik adalah sebagai berikut:

1) Deskripsi Variabel Kompetensi

Variabel kompetensi terdiri dari lima pertanyaan. Berdasarkan hasil kuesioner tentang variabel ini diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.8
Deskripsi Responden Terhadap Variabel Kompetensi

No	Variabel X ₁	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	Perangkat desa menyusun administrasi perencanaan dan realisasi pembangunan desa dengan baik.	1	28	2	60	35	126	3.79	Tinggi
2	Perangkat desa memahami dengan	0	0	28	67	31	126	4.02	Sangat

	baik setiap regulasi yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan desa.									Tinggi
3	Perencanaan pembangunan desa harus mengikuti regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.	1	7	8	78	32	126	4.06		Sangat Tinggi
4	Perangkat desa memfasilitasi masyarakat dengan undangan lisan dan tulisan untuk mengikuti musyawarah desa.	12	3	13	64	34	126	3.83		Tinggi
5	Perangkat desa mendorong sikap keterbukaan pendapat dan saling menghargai.	2	8	12	54	50	126	4.13		Sangat Tinggi
Total rata-rata								3.97		Tinggi

Sumber: Output data SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum tanggapan responden terhadap variabel kompetensi mayoritas menjawab “setuju” dengan rata-rata skor adalah 4. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi merupakan hal yang vital untuk dimiliki oleh setiap aparatur desa.

2) Deskripsi Variabel Partisipasi

Berdasarkan hasil kuesioner tentang variabel partisipasi diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.9
Deskripsi Responden Terhadap Variabel Partisipasi

No	Variabel X ₂	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	Perangkat desa melibatkan masyarakat dalam penyusunan arah dan kebijakan umum keuangan desa yang ditandai dengan adanya publikasi hasil musyawarah desa beserta absensi masyarakat yang berhadir.	11	2	1	76	36	126	3.98	Tinggi
2	Perangkat desa serta masyarakat menerima, memanfaatkan dan melestarikan hasil pembangunan.	0	0	30	72	24	126	3.95	Tinggi
3	Perangkat desa membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan serta mengakses informasi yang relevan.	0	2	4	92	28	126	4.16	Sangat Tinggi
4	Perangkat desa mengapresiasi ide serta dukungan oleh masyarakat dengan memberikan cinderamata.	0	34	23	50	19	126	3.43	Tinggi
Total rata-rata								3.88	Tinggi

Sumber: Output data SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum tanggapan responden terhadap variabel partisipasi mayoritas menjawab “setuju” dengan rata-rata skor adalah 4. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur desa sangat mengharapkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan desa.

3) Deskripsi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan hasil kuesioner tentang variabel ini diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.10
Deskripsi Responden Terhadap Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Variabel X ₃	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	Setiap desa/ staff akuntansi/ bendahara desa memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.	0	2	1	76	47	126	4.19	Sangat Tinggi
2	Jaringan internet terpasang di desa.	1	0	6	86	33	126	3.70	Tinggi
3	Peralatan yang sudah rusak di data dan langsung diganti.	28	1	4	68	25	126	3.48	Tinggi
4	Setiap transaksi dan pembuatan laporan keuangan menggunakan komputerisasi.	0	3	5	69	49	126	4.30	Sangat Tinggi
5	Pemanfaatan teknologi mempermudah dalam menyebar informasi terkait laporan keuangan, dalam website resmi desa.	0	1	34	63	28	126	3.94	Tinggi
6	Jaringan internet	0	3	8	59	56	126	4.33	Sangat

dimanfaatkan untuk menghubungkan antar unit kerja untuk pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.									Tinggi
Total rata-rata								3.99	Tinggi

Sumber: Output data SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum tanggapan responden terhadap variabel pemanfaatan teknologi informasi mayoritas menjawab “setuju” dan “sangat setuju” dengan rata-rata skor adalah 4 dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi sudah sangat dibutuhkan dalam rangka mempercepat serta mempermudah urusan manusia, bahkan skala desa sekalipun.

4) Deskripsi Variabel Transparansi

Variabel transparansi terdiri dari tiga pertanyaan. Berdasarkan hasil kuesioner tentang variabel ini diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.11

Deskripsi Responden Terhadap Variabel Transparansi

No	Variabel Y ₁	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	Perangkat desa memastikan tersebarnya undangan musyawarah rencana dan laporan penggunaan keuangan desa.	0	5	12	77	32	126	4.08	Tinggi

2	Perangkat desa mensosialisasikan informasi-informasi yang bisa diakses secara umum.	0	1	30	73	22	126	3.92	Tinggi
3	Berita acara hasil keputusan rapat ditandatangani bersama masyarakat yang turut hadir dalam rapat.	18	4	5	58	41	126	3.79	Tinggi
Total rata-rata								3.93	Tinggi

Sumber: Output data SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum tanggapan responden terhadap variabel transparansi mayoritas menjawab “setuju” dengan rata-rata skor adalah 4. Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa menghargai keterbukaan sebagai sebuah bentuk kemajuan dan keberlanjutan pembangunan.

5) Deskripsi Variabel Akuntabilitas

Variabel akuntabilitas terdiri dari tiga pertanyaan. Berdasarkan hasil kuesioner tentang variabel ini diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.12
Deskripsi Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas

No	Variabel Y ₂	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	Masyarakat mendapat akses terhadap laporan realisasi penggunaan dana desa.	6	9	4	72	35	126	3.96	Tinggi

2	Perangkat desa menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa tepat waktu.	4	6	21	53	42	126	3.98	Tinggi
3	Perangkat desa bertanggung jawab penuh terhadap realisasi penggunaan dana desa sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati.	0	14	16	44	62	126	4.22	Sangat Tinggi
Total rata-rata								4.05	Tinggi

Sumber: Output data SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum tanggapan responden terhadap variabel akuntabilitas mayoritas menjawab “setuju” dan “sangat setuju” dengan rata-rata skor adalah 4 dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur setuju untuk diaudit bahkan oleh masyarakatnya sendiri.

4.2 Hasil Uji Kualitas Data

(1) Hasil Uji Reliabilitas

Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila tingkat kesalahan minimal Alpha (Cronbach) adalah 0.06. Semakin mendekati 1 koefisien dari variabel semakin tinggi konsistensi jawaban butir-butir pertanyaan semakin dapat dipercaya. Hasil rekapitulasi uji reliabilitas dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Item	Cronbach Alpha	Hasil	Keterangan
Kompetensi X ₁	5	> 0.6	0.709	Reliabel
Partisipasi X ₂	4	> 0.6	0.621	Reliabel
Pemanfaatan teknologi informasi X ₃	6	> 0.6	0.749	Reliabel
Transparansi Y ₁	3	> 0.6	0.703	Reliabel
Akuntabilitas Y ₂	3	> 0.6	0.656	Reliabel
Total	21	> 0.6	0.892	Reliabel

Sumber: Output data SPSS

Hasil uji reliabilitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki koefisien cronbach's alpha lebih dari 0.60. Hal ini dapat dikatakan bahwa semua instrumen reliabel sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

(2) Hasil Uji Validitas

Suatu instrumen dikatakan valid/ sah apabila nilai r hitung > r table. R tabel adalah jumlah responden dikurangi variabel yang diuji, yaitu 126 dikurangi 5 artinya kolom ke 121 dengan probabilitas 5% atau 0.05. Maka r tabel untuk penelitian ini adalah 0.177 (daftar r tabel terlampir). Hasil rekapitulasi uji validitas dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	r Hitung	Keterangan
Kompetensi X ₁	X1.1	0.837	Valid
	X1.2	0.852	Valid
	X1.3	0.625	Valid

	X1.4	0.715	Valid
	X1.5	0.431	Valid
Partisipasi X ₂	X2.1	0.787	Valid
	X2.2	0.772	Valid
	X2.3	0.322	Valid
	X2.4	0.796	Valid
	X3.1	0.492	Valid
Pemanfaatan teknologi informasi X ₃	X3.2	0.907	Valid
	X3.3	0.864	Valid
	X3.4	0.516	Valid
	X3.5	0.826	Valid
	X3.6	0.308	Valid
	Transparansi Y ₁	Y1.1	0.749
Y1.2		0.758	Valid
Y1.3		0.920	Valid
Akuntabilitas Y ₂	Y2.1	0.773	Valid
	Y2.2	0.734	Valid
	Y2.3	0.804	Valid

Sumber: Output data SPSS

Hasil uji validitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai r table lebih besar dari 0.177, artinya r hitung > r table. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan dalam instrument penelitian tersebut valid.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Semua variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti telah memenuhi uji asumsi klasik yaitu datanya adalah normal, tidak terjadi multikolinearitas serta tidak terjadi heteroskedastisitas.

(1) Hasil Uji Normalitas

Adapun hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		0.709	126
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.621	.0000000
	Std. Deviation	0.749	1.49326325
Most Extreme Differences	Absolute	0.703	.093
	Positive		.058
	Negative		-.093
Test Statistic			.093
Asymp. Sig. (2-tailed)			.010 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.213 ^d

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output data SPSS

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas didapat nilai signifikansi monte carlo dua arah sebesar 0.213 yang mana nilainya lebih besar dari 0.05. Oleh karena nilai signifikansi uji kolmogorov-smirnov lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tersebut terdistribusi normal.

(2) Hasil Uji Multikolinearitas

Berikut hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini yang berfokus pada nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF):

Tabel 4.16
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kompetensi _X ₁	.301	3.321
Partisipasi _X ₂	.326	3.063
Pemanfaatan teknologi informasi _X ₃	.305	3.283
Transparansi _Y ₁	.466	2.144

a. Dependent Variable: Akuntabilitas _Y₂

Sumber: Output data SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai tolerance untuk setiap variabel lebih besar dari 10% atau 0.1 dan nilai VIF jauh dibawah 10 yang berarti model persamaan regresi bebas dari multikolinieritas.

(3) Hasil Uji Heterokedastisitas

Jika variabel bebas yang diteliti tidak mempunyai pengaruh signifikan atau nilai signifikansinya lebih dari 0.05 terhadap nilai absolute residual, berarti model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.17
Hasil Uji Heterokedastisitas

	Koefisien Uji Glejser		
	Unstandardized Coefficients		
	B	Std. Error	Sig.
(Constant)	347.502	157.233	.029
Kompetensi X ₁	.571	1.271	.654
Partisipasi X ₂	.023	.060	.699
Pemanfaatan teknologi informasi X ₃	-.011	.035	.751
Transparansi Y ₁	-.044	.055	.430

a. Dependent Variable: ABS_RESIDUAL

Sumber: Output data SPSS

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi seluruh variabel lebih besar dari 0.05 yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap absolute residual. Dengan demikian, model yang dibuat tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Berdasarkan pada uraian dan beberapa tes di atas, dapat disimpulkan ringkasan hasil uji asumsi klasik sebagai berikut:

Tabel 4.18
Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

Nama Variabel	Normalitas	Multikolinearitas	Heteroskedastisitas
Kompetensi X_1	Data normal	Tidak terjadi multikolinearitas	tidak terjadi heteroskedastisitas
Partisipasi X_2	Data normal	tidak terjadi multikolinearitas	tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemanfaatan teknologi informasi X_3	Data normal	Tidak terjadi multikolinearitas	tidak terjadi heteroskedastisitas
Transparansi Y_1	Data normal	Tidak terjadi multikolinearitas	tidak terjadi heteroskedastisitas
Akuntabilitas Y_2	Data normal	Tidak terjadi multikolinearitas	tidak terjadi heteroskedastisitas

Rangkuman tabel di atas menunjukkan bahwa semua hasil uji asumsi klasik sudah terpenuhi, sehingga penelitian ini layak untuk dibahas lebih lanjut.

4.4 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Analisis regresi moderasi digunakan untuk menganalisis variabel transparansi (Y_1) dalam memediasi hubungan antara variabel independen yaitu, kompetensi (X_1), partisipasi (X_2), pemanfaatan teknologi informasi (X_3) serta

secara bersama-sama antara $X_1X_2X_3$ terhadap variabel dependen (akuntabilitas).

Hasil analisisnya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.19
Hasil Uji MRA Dengan Persamaan Quasi Moderator

Keterangan	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
Constant	17.503	6.082	2.878	.005
Kompetensi (X1)	-.831	.365	-2.277	.025
Partisipasi (X2)	-.450	.397	-1.135	.259
Pemanfaatan teknologi informasi (X3)	.590	.339	1.743	.084
Transparansi (Y1)	-2.799	.860	-3.254	.001
Kompetensi dengan transparansi (X1Y1)	.125	.036	3.495	.001
Partisipasi dengan transparansi (X2Y1)	.093	.041	2.285	.024
Pemanfaatan teknologi informasi dengan transparansi (X3Y1)	-.001	.031	-.034	.973
Kompetensi, Partisipasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan transparansi (X1X2X3Y1)	.000	.000	-3.424	.001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Output data SPSS

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil persamaan regresi:

$$Y_2 = 17.503 - 0.831.X_1 - 0.450.X_2 + 0.590.X_3 - 2.799.Y_1 + 0.125.X_1Y_1 + 0.093.X_2Y_1 - 0.001.X_3Y_1 - 0.000.X_1X_2X_3Y_1 + e$$

Pengambilan keputusan:

- a. Interaksi X_1Y_1 adalah 0.001 artinya lebih kecil dari 0.05 (sig < 5%) maka hal ini berarti transparansi terbukti sebagai variabel moderasi

antara variabel kompetensi pemerintah desa (X_1) dengan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y_2).

- b. Interaksi X_2Y_1 adalah 0.024 artinya lebih kecil dari 0.05 (sig < 5%) maka transparansi terbukti sebagai variabel moderasi antara variabel partisipasi masyarakat desa (X_2) dengan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y_2).
- c. Interaksi X_3Y_1 adalah 0.973 artinya lebih besar dari 0.05 (sig < 5%) berarti transparansi tidak terbukti sebagai variabel moderasi antara variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_3) dengan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y_2).
- d. Interaksi $X_1X_2X_3Y_1$ adalah 0.001 artinya lebih kecil dari 0.05 (sig < 5%) berarti transparansi terbukti sebagai variabel moderasi secara bersamaan antara variabel kompetensi pemerintah desa (X_1), variabel partisipasi masyarakat desa (X_2) dan variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_3) dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y_2).

4.5 Hasil Uji Kelayakan Model/ Goodness of Fit (Fit Model)

(1) Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel independen yang digunakan memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen jika diujikan secara bersamaan. Berikut hasil uji yang diperoleh:

Tabel 4.20
Hasil Uji F

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	416.519	8	52.065	25.349	.000 ^b
Residual	240.306	117	2.054		
Total	656.825	125			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

b. Predictors: (Constant), Kompetensi, Partisipasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan transparansi, Transparansi, Partisipasi, Kompetensi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi dengan transparansi, Kompetensi dengan transparansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan transparansi

Sumber: Output data SPSS

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 25.349 serta nilai sig. adalah 0,000. Nilai F tabel ($F_{0.05}(8,117)$) dengan rumus $=F.INV.RT(0,05;8,117)$ adalah sebesar 2.02 maka bisa diambil kesimpulan bahwa nilai F hitung $> F$ tabel dan sig. $0,000 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dikatakan cocok.

(2) Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Kemampuan variabel bebas (independent) pada penelitian ini sudah memadai. Sebagaimana yang tampak pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.21
Hasil Uji koefisien determinasi (R Square)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate
0.796a	0.634	0.609	1.433

a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Partisipasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Transparansi, Kompetensi dengan transparansi, Partisipasi dengan transparansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan transparansi, Kompetensi-Partisipasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan transparansi

Sumber: Output data SPSS

Nilai R^2 yang besar berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat luas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai R^2 adalah 0.634, angka ini sudah dekat dengan 1, maka bisa dikatakan bahwa penelitian ini baik.

Sedangkan nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0.609 maka berarti 60.9% variabel kompetensi, partisipasi, pemanfaatan teknologi informasi yang dimoderasi oleh transparansi bersama-sama atau secara simultan mempengaruhi akuntabilitas sedangkan pada sisanya 29.1% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain dan tidak dapat dijelaskan pada penelitian ini.

4.6 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Suatu hipotesis bisa diterima apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig < 5\%$. Nilai t_{tabel} adalah jumlah responden dikurangi variabel yang diuji, maka nilai t_{tabel} untuk penelitian ini adalah 126 dikurangi 5 artinya kolom ke 121. Maka nilai t_{tabel} untuk penelitian ini adalah 1.979 (daftar t_{tabel} terlampir). Tabel dibawah ini merupakan hasil dari perhitungan uji t atau disebut pula t_{hitung} .

Tabel 4.22
Hasil Uji t

Variabel	t	p-value	Kesimpulan
Kompetensi	2.186	.031	H ₁ diterima
Partisipasi	.926	.356	H ₂ ditolak
Pemanfaatan teknologi informasi	3.036	.003	H ₃ diterima
Transparansi	2.167	.032	H ₄ diterima

a. Dependent Variable: Akuntabilitas
Sumber: Output data SPSS

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil perhitungan nilai t dan nilai signifikansi tiap variabel adalah:

1. X1 nilai t hitung $>$ nilai t tabel, yaitu $2.186 > 1.97$ serta nilai signifikansinya 0.031 atau lebih kecil dari 0.05 (5%), maka variabel X1 dapat dinyatakan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. X2 nilai t hitung $<$ nilai t tabel, yaitu $0.926 < 1.97$ dengan nilai signifikansinya 0.356 atau lebih besar dari 0.05 (5%), maka variabel X2 dapat dinyatakan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. X3 nilai t hitung $>$ nilai t tabel, yaitu $3.036 > 1.97$ serta nilai signifikansinya 0.003 atau lebih kecil dari 0.05 (5%), maka variabel X3 dapat dinyatakan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Y1 nilai t hitung $>$ nilai t tabel, yaitu $2.167 > 1.97$ serta nilai signifikansinya 0.032 atau lebih kecil dari 0.05 (5%), maka variabel Y1

dapat dinyatakan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.7 Pembahasan

(1) Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan selisih nilai t hitung dengan t tabelnya adalah 0.21 serta selisih nilai signifikansinya lebih kecil 0.02. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka ketercapaian akuntabilitas dalam pengelolaannya akan semakin bagus. Kompetensi merupakan syarat utama dalam mencapai akuntabilitas sehingga setiap laporan kegiatan bisa dipertanggungjawabkan atas berhasil atau tidaknya yang akan memacu inovasi dan kreativitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmadja et al., 2018, Azlina et al., 2017, Aliamin et al., 2023 dan Atiningsih & Ningtyas, 2019 yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan kekuatan dasar dalam hal membangun kinerja yang baik, efektif dan bermartabat. Hal serupa juga diungkapkan dalam stakeholder theory yang mensyaratkan professional skill.

(2) Pengaruh Partisipasi Terhadap Akuntabilitas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan selisih nilai t hitung dengan t tabelnya adalah 1.05 serta selisih nilai signifikansinya lebih besar 0.3. Hal

tersebut memberikan gambaran bahwa partisipasi masyarakat desa merupakan langkah substitusi (stakeholder sekunder) yang adakalanya berpengaruh negatif maupun positif.

Partisipasi masyarakat memberikan peningkatan kinerja aparat desa serta meningkatkan pengawasan akuntabilitas pengelolaan dana desa, di kecamatan Banyudono kabupaten Boyolali (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Namun, di kabupaten Lombok Tengah (Luthfiani et al., 2020) melaporkan temuan yang berbeda, yaitu partisipasi tidak mempengaruhi akuntabilitas.

(3) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan selisih nilai t hitung dengan t tabelnya adalah 1.06 serta selisih nilai signifikansinya lebih kecil 0.04. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan langkah jitu dalam mencapai akuntabilitas pertanggungjawaban pemerintahan karena memiliki keunggulan dalam keakuratan dan integrasi hasil operasi datanya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri et al., (2022), (Sarah et al., 2020) (Aulia, 2018) dan (Arif Widyatama et al., 2017).

(4) Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan selisih nilai t hitung dengan t tabelnya adalah 0.19 serta selisih nilai signifikansinya lebih kecil 0.02. Hal

tersebut memberikan gambaran bahwa semakin bagus transparansi yang dieksekusi oleh aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan, maka akan semakin bagus pula akuntabilitas pengelolaan dana desanya karena transparansi mampu membangun kepercayaan, citra serta jati diri good governance.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anas & Setiyowati, 2021), (Tambuwun et al., 2018) (Fahrezi, 2022) dan (Napisah & Taufiqurachman, 2020).

(5) Pengaruh Kompetensi yang Dimoderasi Oleh Transparansi Terhadap Akuntabilitas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi yang dimoderasi oleh transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai interaksi 0.001 yang berarti lebih kecil dari 0.05 ($\text{sig} < 5\%$). Hal tersebut memberikan popan bahwa semakin bagus transparansi yang dieksekusi oleh aparatur desa yang berkompotensi dalam menjalankan pemerintahan, maka akan semakin bagus pula akuntabilitas pengelolaan dana desanya karena transparansi yang berkompotensi mampu membangun kepercayaan yang solid, citra serta jati diri good governance yang kokoh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karyadi, 2019); (Masruhin & Kaukab, 2019); (Nurhidayati, 2019); (Atiningsih & Ningtyas, 2019); (Perdana, 2018); (Atmadja et al., 2018) dan (Aulia, 2018).

(6) Pengaruh Partisipasi yang Dimoderasi Oleh Transparansi Terhadap Akuntabilitas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi yang dimoderasi oleh transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai interaksi 0.024 yang berarti lebih kecil dari 0.05 ($\text{sig} < 5\%$). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa semakin banyak partisipasi yang transparan, maka akan semakin bagus pula akuntabilitas pengelolaan dana desanya karena partisipasi yang transparan mampu membangun kepercayaan kolektif yang bebas dari kepentingan individu dan atau golongan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Latunussa et al., 2022).

(7) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Dimoderasi Oleh Transparansi Terhadap Akuntabilitas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang dimoderasi oleh transparansi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai interaksi 0.973 yang berarti lebih besar dari 0.05 ($\text{sig} < 5\%$). Hal ini memberikan gambaran bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang transparan membuka ruang akses yang terlalu besar buat masyarakat sehingga memberikan terlalu banyak *interupsi* terhadap kebijakan yang akan diambil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sujarweni (2015) dalam (Garung & Ga, 2020).

(8) Pengaruh Kompetensi, Partisipasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Dimoderasi Oleh Transparansi Terhadap Akuntabilitas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi, partisipasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang dimoderasi oleh transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai interaksi 0.001 yang berarti lebih kecil dari 0.05 ($\text{sig} < 5\%$). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa dalam mencapai sebuah tujuan maka dibutuhkan berbagai macam faktor yang saling terkait satu dengan lainnya atau yang sering dikenal dengan istilah holistik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanafie et al., (2019) dan (Sarah et al., 2020) dimana prinsip-prinsip good governance terdiri dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kompetensi. Begitupun halnya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Namun transparansi merupakan syarat yang pertama dan utama dalam mencapai akuntabilitas untuk meningkatkan efektivitas pengaruhnya terhadap ketiga indikator penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian, olah data penelitian serta observasi lainnya berdasarkan rumusan masalah yang telah dirancang dalam penelitian ini yaitu menguji pengaruh hubungan langsung antara variabel dependent dengan variabel independent serta menguji pengaruh tidak langsung dengan adanya variabel mediasi, maka dapat ditemukan hasil pengaruh antar variabel penelitian. Adapun dari olah data primer dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS versi 25 dengan hasil penelitian sebagai berikut :

- (1) Kompetensi (X_1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel akuntabilitas (Y_2).
- (2) Partisipasi (X_2) terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel akuntabilitas (Y_2).
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi (X_3) berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel akuntabilitas (Y_2).
- (4) Transparansi (Y_1) terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel akuntabilitas (Y_2).
- (5) Transparansi (Y_1) terbukti sebagai variabel moderasi antara variabel kompetensi pemerintah desa (X_1) dengan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y_2).
- (6) Transparansi (Y_1) terbukti sebagai variabel moderasi antara variabel partisipasi masyarakat desa (X_2) dengan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y_2).

- (7) Transparansi (Y_1) tidak terbukti sebagai variabel moderasi antara variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_3) dengan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y_2).
- (8) Transparansi (Y_1) terbukti sebagai variabel moderasi secara bersamaan antara variabel kompetensi pemerintah desa (X_1), variabel partisipasi masyarakat desa (X_2) dan variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_3) dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y_2).

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian mempunyai keterbatasan populasi dan sampel, yaitu perangkat desa di wilayah kecamatan Lhoknga kabupaten Aceh Besar provinsi Aceh, sehingga hasil penelitian kemungkinan belum mewakili secara menyeluruh bagi kecamatan lainnya di wilayah Indonesia.

5.3 AGENDA PENELITIAN MENDATANG

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka agenda pada penelitian mendatang bisa melakukan hal-hal berikut:

1. Penelitian selanjutnya bisa memakai pengukuran lain yang lebih beragam seperti peran pendamping, peran pemerintah lokal bahkan peran punish and reward dalam organisasi pemerintahan.
2. Mengganti sampel penelitian dari aparaturnya desa menjadi masyarakat desa atau yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliamin, Ludiharto, & Priantana, R. D. (2023). *Pengaruh Kompetensi , Akuntabilitas , dan Peran Pendamping*. 11(1), 151–164. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.50434>
- Amy Springsteel, Nadkarni, A., Carter, A. L. S., Kim, D., & Matic, N. M. (2018). AA1000 Accountability principles 2018. *AccountAbility*, 40. <https://www.accountability.org/standards/>
- Anas, D. E. A. F., & Setiyowati, S. W. (2021). Partisipasi Membentuk Hubungan Antara Aspek Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(2), 119–128. <https://doi.org/10.24252/jiap.v7i2.26833>
- April, P., Akuntansi, J. R., Purnomo, B. S., & Putri, C. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. *Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money*, 6(3), 467–480. <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14886>
- Arif Widyatama, Lola Novita, & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 122–129. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Accountability for managing village fund allocations in Jember Regency. *Journal of Accounting and Financial Research*, 2(3), 473–485.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1).
- Atmadja, A. T., Adi, K., & Saputra, K. (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12, 7–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.v12.i01.p02>
- Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., & Koswara, M. K. (2018). The influence of village conflict, village apparatus ability, village facilitator competency and commitment of local government on the success of budget management. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(1). <https://www.researchgate.net/publication/323666359>
- Aulia, P. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa,

Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. *Jom Feb*, 1(1), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/iaj/article/view/29261>

Azlina, N., Hasan, A., Desmiyawati, & Muda, I. (2017). The effectiveness of village fund management (case study at villages in coastal areas in Riau). *International Journal of Economic Research*, 14(12), 325–336. www.serialsjournal.com

Bawono, I. R., Kinasih, A. D. M., & Rahayu, A. K. (2020). Factors Affecting Accountability of Village Fund Management through Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES). *Journal of Accounting and Investment*, 21(3). <https://doi.org/10.18196/jai.2103160>

Bere, M. Y., Nursalam, N., & Toda, H. (2020). Social participation in the management of village funds in Sanleo village, East Malaka sub-district, Malaka regency. *Annals of Management and Organization Research*, 2(2), 81–96. <https://doi.org/10.35912/amor.v2i2.759>

Budiana, D. A., Said, D., & -, N. (2019). the Effect of Village Device Competencies and Internal Control System on Accountability of Village Management. *Scientific Research Journal*, VII(I), 10–20. <https://doi.org/10.31364/scirj/v7.i1.2019.p0119599>

Dewi, E. P. (2018). Good Governance Dan Transparansi Rencana Strategi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Lentera Bisnis*, 7(2), 81. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v7i2.236>

Dewi, F. G. R., & Sapari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–20.

Dewi, N. M. A. M., Sudiana, I. W., & Putra, C. G. B. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 85–95. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i2.2430>

Fahrezi, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan transparansi Laporan keuangan terhadap tingkat Kepercayaan Donatur pada Mesjid jamik Medan Tenggara VII. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 39–46. <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.39-46>

Fatmawati, Hakim, L., & Mappamiring. (2020). Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Jurnal of Public Policy and Management*, 1(1), 15–21.

- Freeman, R. E. (2020). A Stakeholder Theory of the Modern Corporation. *Bus. Soc.*, 59(2). <https://doi.org/10.1177/0007650318773750>
- Freeman, R. E., Phillips, R., & Sisodia, R. (2020). Tensions in Stakeholder Theory. *Business and Society*, 59(2), 213–231. <https://doi.org/10.1177/0007650318773750>
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 39–43. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231>
- Hanafie, H., Nugraha, A., & Huda, M. (2019). Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(1), 39–46. <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.39-46>
- Hanny S. Untayana, Selva Temalagi, & Fanny M. Anakotta. (2023). Village Government Accountability and Transparency towards the Management of Durjela Village Fund, Aru Islands Subdistrict. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 3(1), 862–876. <https://doi.org/10.31328/cebi.v3i1.405>
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik (JAKPP)*, 2(1), 15–30.
- Hoekstra, A., Huberts, L., & van Montfort, A. (2022). Content and Design of Integrity Systems: Evaluating Integrity Systems in Local Government. *Public Integrity*, 25(2), 137–149. <https://doi.org/10.1080/10999922.2021.2014204>
- Ifada, L. M., Suhendi, C., & Hanafi, R. (2021). The Role of Board of Commissioners in Islamic Social Reporting. *Jurnal Economia*, 17(2), 195–207. <https://doi.org/10.21831/economia.v17i2.39682>
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3866>
- Indriasih, D., & Sulistyowati, W. A. (2022). The Role of Commitment, Competence, Internal Control system, Transparency and Accessibility in Predicting the Accountability of Village Fund Management. *The Indonesian*

Accounting Review, 12(1), 73. <https://doi.org/10.14414/tiar.v12i1.2650>

- Karyadi, M. (2019). Pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan desa (studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani*, 7(2), 33–46. <https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/123>
- Khamainy, A. H., Ali, M., & Setiawan, M. A. (2022). Detecting financial statement fraud through new fraud diamond model: the case of Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 925–941. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2021-0118>
- Knight, A., Pattberg, A., Ewings, A., & Waheed, A. (2011). *AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2011*. www.accountability.org
- Langrafe, T. de F., Barakat, S. R., Stocker, F., & Boaventura, J. M. G. (2020). A stakeholder theory approach to creating value in higher education institutions. *Bottom Line*, 33(4), 297–313. <https://doi.org/10.1108/BL-03-2020-0021>
- Latunussa, T., Sialana, F., & Abas, A. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Desa Bebar Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 9584–9594. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/3939%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/3939/3282>
- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1886. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p20>
- Mardiasmo, M. (2013). Assessing Accountability of Performance Measurement System and Local Government Budgetary Management. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 4(3), 373. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.5388>
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Meutia, I., & Febrianti, D. (2017). Islamic Social Reporting in Islamic Banking: Stakeholders Theory Perspective. *SHS Web of Conferences*, 34, 12001. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20173412001>

- Mu, H. L., Xu, J., & Chen, S. (2023). The Impact Of Corporate Social Responsibility Types On Happiness Management: A Stakeholder Theory Perspective. *Management Decision*. <https://doi.org/10.1108/MD-02-2023-0267>
- Mus, S. F., Amirullah, S., Muslimah, H., Am, A. M., & Ilyas, H. (2023). Economics and Digital Business Review Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas Pengelolaan. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 436–443.
- Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79–88. <https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397>
- Nazaruddin, I., Nirmala, N. A., Az-zahro, S. F., Ratifah, I., Program, A. S., Yogyakarta, U. M., Program, A. S., Pasundan, U., & Selatan, J. L. (2022). the Mediation Role of Internal Control Implementation. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 15(2023), 67–75. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/jrak/index> Ietje
- Nurhidayati, D. (2019). Does Digital Public Service Complaint Promote Accountability? A Comparative Analysis of Upik Yogyakarta and Qlue Jakarta. *Policy & Governance Review*, 3(2), 127. <https://doi.org/10.30589/pgr.v3i2.139>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Pangayow, B., & Patma, K. (2021). Planning, accountability and reporting of village financial management in Indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(2), 197–203. <https://doi.org/10.13189/UJAF.2021.090208>
- Perdana, K. W. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. *Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta*.
- Raharjo, S. (2017). *Cara Mengatasi Masalah Autokorelasi dengan Uji Run Test dalam SPSS*. <https://www.spssindonesia.com/2017/03/autokorelasi-dengan-uji-run-test-spss.html>
- Rahmah, Y., Rahmawati, V., & Natariasari, R. (2018). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Go

Public Di Indonesia dan Thailand. *Jom Feb*, 1(1), 1–15.

- Riberu, M. A. R., & Asyik, N. fadjrih. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 10(10), 1–15.
- Ridwan, M., Santosa, R. E. W. A., Suharto, S., & Putri, A. P. R. Z. (2023). Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat Pada Hubungan Kompetensi Pengelola, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 92. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i1.1429>
- Šabović, M. T., Milosavljevic, M., & Benkovic, S. (2021). Decision-Making in Serbia. *Slovak Journal of Political Sciences (SJPS)*, 21(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.34135/sjps.210205>
- Santoso, L., Suprihati, S., & Ningsih, S. (2022). The Effect of Village Apparatus Competence, Internal Control System, and Organizational Commitments on Village Fund Management Accountability (Case Research in Banyudono District). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(3), 1233–1243. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i3.6236>
- Sarah, S., Taufik, T., Safitri, D., & Riau, U. (2020). The Effect Of Aparatur Competency, Organizational Commitment, Utilization Of Information Technology, Community Participation And Internal Control System Of The Accountability Of Village Management In Kabupaten Indragiri Hulu. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 330–342.
- Sarifudin Mada, Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 3(12), 106–115.
- Savitri, E., Andreas, A., Diyanto, V., & Gumanti, T. A. (2022). Accountability of Village Fund Management in Riau Province. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(2). <https://doi.org/10.23969/jrak.v14i2.5550>
- Shaleh, K., Subing, H. J. T., & Yustina, A. I. (2020). Village Financial Management: Based on Local Tradition. *Integrated Journal of Business and Economics*, 4(1), 23. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v4i1.245>
- Sofyani, H., Yaya, R., & Widiastuti, H. (2023). The Story of Rising Corruption Post-Village Government Reform - A View of Three Theories: Fraud, Managerial Hegemony, and Culture. *Journal of Accounting and Investment*, 24(1), 101–119. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i1.16462>

- Springsteel, A., Nadkarni, A., Carter, A. L. S., Kim, D., & Matic, N. M. (2018). *AA1000 Assurance Standard (AA1000AS, 2008) with 2018 Addendum*. September, 30. <https://www.accountability.org/standards/>
- Sugista, R. A. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Sosiologi*, 01, 18.
- Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 76–84. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20904.2018>
- Temalagi, S., & Anakkota, F. M. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 179–194. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231>
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Usman. (2020). *Kecamatan Lhoknga Dalam Angka 2020*
oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) Peukan Bada.
<https://acehbesarkab.bps.go.id>
- Wikantosa, B. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa 2022 oleh Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan. *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia*.